

Figur Moral dalam Politik Papua: Strategi Komunikasi Benhur Tomi Mano (BTM) Pasca Kekalahan Elektoral 2025

Rani Yanti Ngabalin

Universitas Pamaramadina Jakarta

raniyanty29@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the political communication strategy of Dr. Drs Benhur Tomi Mano, M.M (BTM) following his electoral defeat in the 2025 Papua Repeat Election (PSU), highlighting his transformation from an electoral leader to a moral leader. Employing a descriptive qualitative approach, this research uses discourse analysis, cultural semiotics, and media triangulation to explore BTM's narratives, symbols, and political messages within Papua's socio-cultural context. The findings reveal that BTM transformed electoral loss into symbolic and moral capital through value-based communication rooted in local wisdom, spirituality, and social solidarity. His rhetoric of compassion, defense of indigenous land (Cycloop), and continuous presence among communities strengthened his moral legitimacy beyond formal authority. The study concludes that BTM's communication strategy represents a model of Papuan leadership that frames politics as a domain of service, reconciliation, and social healing.

Keywords : Komunikasi politik, Legitimasi Moral, Kepemimpinan Papua, Simbol Budaya, Benhur Tomi Mano.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi politik Dr. Drs Benhur Tomi Mano, M.M (BTM) pasca kekalahan elektoral dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Papua 2025 sebagai bentuk transformasi dari kepemimpinan elektoral menuju kepemimpinan moral. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memanfaatkan analisis wacana, semiotika budaya, dan triangulasi media untuk menelusuri narasi, simbol, serta pesan politik yang dibangun BTM dalam konteks sosial-budaya Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTM mengubah kekalahan elektoral menjadi modal simbolik dan moral melalui strategi komunikasi berbasis nilai lokal, spiritualitas, dan solidaritas sosial. Retorika kasih, perlindungan terhadap tanah adat (Cycloop), serta kehadiran di tengah masyarakat menjadi instrumen pembentukan legitimasi moral yang melampaui legitimasi elektoral. Kesimpulannya, strategi komunikasi BTM menghadirkan model kepemimpinan Papua yang menempatkan politik sebagai ruang pelayanan, rekonsiliasi, dan penyembuhan sosial (*politics as healing*).

Kata kunci : Komunikasi Politik, Legitimasi Moral, Kepemimpinan Papua, Simbol Budaya, Benhur Tomi Mano.

PENDAHULUAN

Kemenangan elektoral Dr. Benhur Tomi Mano (BTM) pada Pilkada Papua 2024 sempat menjadi simbol kebangkitan politik masyarakat Tabi-Saireri. Sebagai mantan Wali Kota Jayapura dua periode, BTM tidak hanya dikenal karena pengalamannya dalam birokrasi pemerintahan, tetapi juga karena integritas moral dan kedekatannya dengan masyarakat akar rumput. Dalam memori kolektif warga

Jayapura, BTM adalah pemimpin yang hadir, yang bekerja dengan tangan terbuka, dan yang menafsirkan kepemimpinan bukan semata-mata sebagai kekuasaan, tetapi sebagai pelayanan (*leadership as service*). Keberhasilannya membangun infrastruktur kota, memperkuat pelayanan publik, dan menjaga harmoni sosial lintas suku-agama menjadi fondasi moral yang menegaskan kepercayaannya sebagai “anak negeri yang pulang untuk melayani.”

Dalam konteks politik Papua, kemenangan BTM pada 2024 merepresentasikan semangat afirmasi terhadap kepemimpinan lokal sebuah artikulasi dari gagasan “orang Papua menjadi tuan di negeri sendiri.” Dukungan masyarakat terhadap Benhur Tomi Mano (BTM) mencerminkan pengakuan terhadap sosok pemimpin yang berakar kuat pada budaya dan nilai-nilai lokal Papua. Dalam opini yang ditulis oleh Abinus Sama, BTM digambarkan sebagai pemimpin yang “lahir dari rakyat dan tumbuh bersama rakyat,” serta memahami Papua “dari hati, dari akar, dan dari luka-luka sejarahnya” (Sama, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan BTM tidak hanya bersumber dari struktur formal, tetapi juga dari kedekatannya dengan identitas kultural masyarakat Papua.

Pemimpin seperti BTM tidak hanya dipilih karena kompetensi administratifnya, tetapi juga karena kemampuan simboliknya untuk meneguhkan identitas kolektif masyarakat adat. Dalam pemberitaan *Kompas.com* (2025), kemenangan BTM-Yermias Bisai dipandang sebagai representasi aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan sosok pemimpin lokal yang memahami konteks sosial-budaya mereka. BTM disebut sebagai figur yang “membawa harapan baru” melalui gaya kepemimpinan yang inklusif, komunikatif, dan spiritual pemimpin yang berbicara dengan hati, bukan sekadar dengan mikrofon politik.

Namun, harapan tersebut diuji ketika Mahkamah Konstitusi (MK), pada 24 Februari 2025, membatalkan hasil Pilkada Papua dan memerintahkan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** akibat persoalan administratif dalam pencalonan wakil gubernur, Yermias Bisai. MK menilai dokumen pencalonan Yermias tidak memenuhi syarat formal, sehingga pasangan BTM-YB didiskualifikasi. Putusan ini mengguncang tidak hanya lanskap politik lokal, tetapi juga legitimasi moral dan psikologis para pendukungnya. Di mata masyarakat adat, keputusan hukum ini tidak semata persoalan administratif, tetapi juga dianggap sebagai “ujian spiritual” terhadap nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sosial.

Manoby at.all. (2023) menjelaskan bahwa dinamika politik di Papua selalu dipengaruhi oleh relasi antara kepemimpinan, masyarakat adat, dan alam sebagai entitas yang hidup. Dalam kerangka ini, kekuasaan bukan hanya hasil elektoral, melainkan bagian dari siklus keseimbangan antara manusia, tanah, dan leluhur. Oleh karena itu, ketika seorang pemimpin seperti BTM menghadapi kekalahan, masyarakat tidak hanya melihatnya sebagai kekalahan politik, tetapi juga sebagai “ujian moral” apakah ia masih memegang nilai adat, kesabaran, dan kasih, atau terjerumus dalam dendam dan kebencian.

Penelitian Miagoni & Mayor (2025) memperkuat hal ini dengan menyebut bahwa struktur politik di Papua sangat dipengaruhi oleh sistem nilai lokal, di mana legitimasi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh proses elektoral, tetapi oleh kemampuannya menjaga harmoni sosial dan merawat relasi dengan komunitas adat. Dengan demikian, kekalahan politik bisa menjadi jalan untuk menunjukkan keteguhan moral dan spiritualitas kepemimpinan. Dalam konteks inilah, *moral legitimacy* menjadi jauh lebih kuat dan bertahan lama dibandingkan *electoral legitimacy*.

Menanggapi putusan MK yang mengguncang basis politiknya, Dr. Drs Benhur Tomi Mano, M.M memilih untuk tidak mundur. Ia tidak bereaksi dengan amarah, melainkan dengan langkah bijak yang mencerminkan karakter moralnya. BTM menyatakan bahwa perjuangan belum berakhir dan memutuskan untuk melanjutkan kontestasi dengan mengganti calon wakil gubernur. Dari 38 nama yang diusulkan oleh tokoh adat dan masyarakat Tabi-Saireri, BTM akhirnya memilih **Drh. Constant Karma**, seorang tokoh senior dan figur berpengalaman yang dihormati lintas komunitas (TerasPapua, 2025). Pilihan ini bukan sekadar strategi politik, melainkan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal: mendahulukan yang dituakan, mendengarkan aspirasi rakyat, dan menjaga keseimbangan adat.

Pasangan **BTM-CK** kemudian maju ke PSU dengan semangat baru. Kampanye mereka tidak lagi menonjolkan kemenangan elektoral, melainkan menyerukan semangat *pemulihan dan persaudaraan*. Dalam pidato pembuka kampanyenya, BTM menekankan bahwa “Papua tidak perlu pemimpin yang berteriak keras, tetapi pemimpin yang bisa mendengar.” Narasi ini menunjukkan transformasi gaya komunikasinya dari politisi kompetitif menjadi figur moral yang menenangkan. Namun, hasil akhir PSU menunjukkan bahwa pasangan BTM-CK belum berhasil merebut kemenangan. Setelah MK menolak gugatan lanjutan mereka, BTM berkata dalam konferensi pers: “Kami kalah oleh sistem, bukan oleh rakyat.” (Nabire.net, 2025). Kalimat ini sarat makna: kekalahan diakui dengan lapang dada, tetapi legitimasi moral tetap dijaga sebagai simbol perjuangan dan keadilan sosial.

Menariknya, setelah putusan MK, BTM tidak menghilang dari ruang publik. Justru dalam masa menuju pemilihan ulang, ia tampil lebih aktif di ruang sosial: melakukan Safari Ramadhan, menghadiri doa lintas iman, serta berkunjung ke komunitas adat dan kampung-kampung nelayan. Dalam setiap pertemuan, ia menegaskan bahwa perjuangannya belum berakhir bahwa “kekalahan (Pasca putusan MK terhadap kemenangan BTM-YB) ini hanyalah kemenangan yang tertunda.” Ungkapan ini menjadi semacam *rhetorical pivot* yang mengubah narasi kekalahan menjadi momentum moral dan spiritual.

Dalam liputan **KabarPapua.co** (2025), BTM juga menegaskan komitmennya untuk melindungi kawasan **Cycloop** dari ancaman eksploitasi tambang nikel, menempatkan dirinya sebagai penjaga ekologis dan spiritual tanah Papua. Sikap ini memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tidak hanya politis, tetapi juga berakar pada nilai-nilai kultural dan ekologis yang hidup dalam masyarakat adat.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa BTM memahami komunikasi politik bukan sekadar alat persuasi, tetapi juga sarana rekonsiliasi dan penyembuhan sosial (*politics as healing*). Dalam teori komunikasi politik, sebagaimana dijelaskan oleh McNair (2017) dan Graber (2012), pesan politik efektif bukan karena kekuatan argumen rasional semata, melainkan karena kemampuannya membangun identitas, makna, dan emosi publik. BTM menerjemahkan teori ini ke dalam praktik dengan mengedepankan retorika solidaritas, spiritualitas, dan kasih sayang lintas iman. Ia mengubah arena politik yang penuh konflik menjadi ruang dialog moral yang menenangkan.

Dari perspektif teori legitimasi Beetham (2013), BTM berhasil mempertahankan *moral legitimacy* meskipun kehilangan *formal authority*. Ia membangun citra sebagai “pemimpin moral” yang tetap dihormati walau tidak berkuasa. Dalam konteks politik Papua, citra seperti ini memiliki kekuatan simbolik yang sangat tinggi, karena masyarakat adat lebih menghargai integritas moral daripada kemenangan formal. BTM menampilkan kepemimpinan yang *resilient*, yang tidak bergantung pada kursi kekuasaan, tetapi pada kepercayaan publik yang lahir dari ketulusan dan kesetiaan pada nilai-nilai lokal.

Jika dilihat dari kacamata *branding politik*, strategi BTM merupakan bentuk *moral-cultural branding*, yaitu pembentukan citra kepemimpinan yang berakar pada nilai budaya dan spiritual masyarakat setempat. Scammell (2007) menjelaskan bahwa dalam politik modern, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manajerialnya, tetapi juga oleh narasi moral yang ia ciptakan. Dalam konteks BTM, simbol-simbol lokal seperti tanah, sungai Cycloop, mama-mama Papua, dan doa lintas iman menjadi *semiotic assets* yang membentuk jembatan emosional dengan publik. Analisis semiotika Peirce (1934) dan Eco (1979) menunjukkan bahwa tanda-tanda tersebut bukan hanya ornamen retorik, tetapi juga sarana membangun makna kolektif menegaskan BTM sebagai figur yang “berakar di tanahnya dan bertumbuh dalam doanya.”

Dalam sistem politik nasional yang masih didominasi oleh logika kekuasaan pusat, strategi BTM dapat dibaca melalui *Co-Cultural Theory* Orbe (1997), yang menyoroti bagaimana kelompok subordinat membangun strategi komunikasi untuk mempertahankan identitas dalam sistem dominan. BTM, sebagai representasi dari kepemimpinan lokal di Papua, tidak melawan sistem secara frontal, melainkan menggunakan strategi adaptif: membangun narasi tandingan yang lembut namun bermakna. Ia menolak dikotomi kalah-menang dalam arti sempit, dan menggantinya dengan konsep “bermartabat dalam setiap hasil.”

Dengan demikian, kekalahan BTM dalam PSU Papua 2025 bukanlah akhir dari karier politiknya, melainkan awal dari transformasi menuju kepemimpinan moral-politik yang lebih matang. Ia berhasil mengonversi kekalahan elektoral menjadi *modal simbolik* menampilkan bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak terletak pada kemenangan, melainkan pada kemampuan menjaga nilai, memelihara kasih, dan merawat kebersamaan dalam masa paling sulit. Dalam lanskap politik Papua yang

sarat makna kultural dan spiritual, figur seperti BTM menghadirkan bentuk baru kepemimpinan yang berakar pada cinta, harmoni, dan legitimasi moral.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam strategi komunikasi politik Benhur Tomi Mano (BTM) dalam membangun legitimasi moral pasca kekalahan elektoral pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Papua 2025. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap makna, simbol, dan narasi yang dibentuk oleh aktor politik dalam konteks sosial-budaya Papua yang kompleks (Creswell & Poth, 2016). Analisis dilakukan melalui tiga teknik utama: analisis wacana politik untuk menelusuri struktur retorika dan ideologi dalam pidato publik BTM dengan merujuk pada pendekatan Fairclough (1995) interpretasi semiotika budaya untuk membaca simbol-simbol lokal seperti "Cycloop sebagai Mama" dan "tanah adat" berdasarkan teori Eco (1934) serta triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan melalui kombinasi sumber seperti pidato publik, materi kampanye, notulensi internal, dan pemberitaan media daring. Data primer dan sekunder diperoleh dari dokumen internal kampanye dan liputan media yang mencerminkan dinamika politik serta respons publik terhadap BTM. Penelitian ini juga menjaga prinsip transparansi dan etika dengan menyebutkan sumber secara eksplisit dan menghindari manipulasi isi dokumen, serta memvalidasi temuan melalui pembacaan kontekstual terhadap realitas politik lokal Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi komunikasi politik Benhur Tomi Mano (BTM) pasca kekalahan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Papua 2025 menampilkan pola yang menonjol, bukan sekadar retorika kampanye, melainkan sebuah praktik komunikasi yang bermoral, simbolik, dan mengandung narasi identitas serta spiritualitas. Ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan elektoral pasangan BTM-Yermias Bisai (YB) pada Februari 2025 karena persoalan administratif dalam pencalonan wakil gubernur, BTM memilih untuk merespons bukan dengan sengketa yang berlarut, namun dengan langkah strategis yang menunjukkan kedewasaan politik dan penegasan nilai-nilai lokal.

Pertama, dalam menghadapi keputusan MK yang mengguncang legitimasi formal kemenangan mereka, BTM melakukan perubahan tandem calon wakil gubernur melalui mekanisme yang cukup terbuka dan melibatkan konsultasi publik disebutkan bahwa "38 nama" dari masyarakat dan tokoh adat dikonsultasikan (Tribun Papua, 2025; Teras Papua, 2025). Pilihan akhirnya jatuh pada **Drh. Constant Karma (CK)**, seorang **birokrat senior dan dokter hewan** yang pernah memimpin **Komisi Penanganan HIV/AIDS Papua**. Dikenal berintegritas dan berpengalaman

dalam pelayanan publik, CK membawa citra kepemimpinan yang empatik dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Dengan menggandeng CK, BTM menegaskan komitmennya pada politik yang berbasis moral, pengabdian, dan penghormatan terhadap aspirasi masyarakat Papua.

Kedua, Ketika hasil PSU resmi diumumkan dan gugatan pasangan BTM-CK atas dugaan pelanggaran ditolak oleh MK (DetikNews, 2025), respons mereka kembali menunjukkan makna komunikasi yang lebih besar daripada sekadar kemenangan atau kekalahan. BTM menyatakan bahwa “kami kalah oleh sistem, bukan oleh rakyat” (Noken Live, 2025). Ungkapan ini memiliki beberapa makna penting: (a) ia mencoba memisahkan legitimasi publik dari legitimasi formal artinya dukungan masyarakat tetap dianggap utuh; (b) ia menegaskan bahwa persoalan bukan pada basis dukungan, melainkan kerangka institusional yang mungkin tidak berpihak; (c) ia sekaligus menjaga citra moralnya bahwa ia menerima hasil secara proporsional dan tidak memilih jalan destruktif.

Dari sudut pandang teori komunikasi politik, apa yang dilakukan BTM dapat dilihat sebagai *narrative reframing* yakni ketika seorang aktor politik menghadapi kegagalan elektoral dan kemudian membalikkan narasi menjadi kesempatan untuk menegaskan identitas dan nilai moralnya (McNair, 2017). Dalam konteks Papua, yang memiliki iklim sosial politik di mana nilai adat, spiritualitas dan relasi komunitas memainkan peran sangat dominan, reframing ini menjadi sangat strategis. Ketika kemenangan formal dicabut, maka figur pemimpin yang mampu menjaga *moral legitimacy* (Beetham, 2013) akan tetap memperoleh ruang simbolik di mata publik.

BTM dalam hal ini berhasil memanfaatkan kekalahan formal sebagai titik transformasi. Ia tidak memilih untuk mundur atau terjebak dalam pertarungan legal administratif yang berkepanjangan, melainkan mengalihkan narasi publik ke arah: “Kami masih di sini bersama masyarakat; tugas kita tetap berjalan.” Ini menciptakan efek psikologis dan simbolik bahwa kegagalan elektoral bukan penanda kegagalan kepemimpinan, melainkan awal dari fase baru kepemimpinan moral-politik. Dalam masyarakat Papua, di mana komunalitas dan nilai kolektif sangat dihargai, kemampuan mempertahankan kehadiran sosial hadir di tengah masyarakat menjadi unsur penting dalam legitimasi seorang pemimpin.

Lebih lanjut, strategi BTM mencerminkan kesadaran bahwa komunikasi politik efektif bukan hanya soal pesan yang disampaikan, tetapi juga soal makna yang dibangun dan bagaimana pesan itu diterima melalui struktur identitas publik (Graber, 2012). Dengan menyatakan bahwa “dukungan moral masyarakat tetap menjadi kekuatan utama,” BTM mengedepankan dua aspek: identitas sebagai pemimpin yang diwarisi dari akar budaya lokal, serta nilai moral (kesetiaan, kejujuran, pelayanan). Ia memberikan sinyal bahwa kursi kekuasaan bukan satu-satunya ukuran legitimasi.

Dalam kerangka teori legitimasi, Beetham (2013) menjelaskan bahwa legitimasi politik terdiri atas tiga unsur: norma, prosedur, dan justifikasi. Normanya adalah nilai-nilai bersama (yang dalam konteks Papua berarti adat, kekerabatan, spiritualitas); prosedurnya adalah proses yang diterima oleh komunitas (pemilihan,

musyawarah); dan justifikasinya adalah dukungan subjektif yang diberikan masyarakat atas kekuasaan. Ketika prosedur formal dibatalkan melalui MK, maka hanya dua unsur yang masih bisa diperkuat: norma dan justifikasi. BTM melalui strategi komunikasinya menegaskan norma (akar budaya, pelayanan) dan memperoleh justifikasi melalui sikap moralnya bahwa ia tetap berada di samping masyarakat.

Kini, kekalahan formal sekaligus menjadi ruang legitimasi alternatif: tidak karena menang, tetapi karena tetap hadir dan relevan dalam kehidupan sosial masyarakat. BTM mengubah kekalahan menjadi *modal simbolik* figur yang tetap dipercaya, bukan karena posisi kekuasaan, tetapi karena etika kepemimpinan yang ditampilkan. Hal ini sangat relevan dalam konteks Papua, di mana masyarakat adat sering menilai pemimpin berdasarkan kehadiran serta bagaimana ia menjaga relasi manusia-alam dan komunitas, bukan hanya mengukur dari hasil elektoral semata.

Retorika Solidaritas dan Moralitas

Salah satu elemen kunci dari strategi komunikasi BTM adalah retorika yang menekankan solidaritas sosial dan moralitas bukan kemenangan atau kekuasaan semata. Pidato-pidato BTM selama Safari Ramadhan 2025 menunjukkan retorika lintas iman yang kuat dan inklusif. Dalam kunjungannya ke Masjid Nurul Huda Expo, Waena, ia menyampaikan bahwa Safari Ramadhan adalah bentuk cinta kasih tanpa membedakan, menegaskan pentingnya persatuan di tengah keberagaman masyarakat Papua (Papua Bangkit, 2025). Pernyataan tersebut memperkuat citra BTM sebagai pemimpin yang tidak menampilkan diri sebagai korban politik, melainkan sebagai figur moral yang tetap hadir di tengah masyarakat, bahkan dalam kekalahan. Strategi komunikasi ini selaras dengan konsep legitimasi moral (Beetham, 2013) dan komunikasi politik berbasis nilai (McNair, 2017), di mana pesan politik tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membentuk identitas dan solidaritas sosial.

Pernyataan seperti ini memiliki beberapa lapisan analisis: (a) ia menegaskan inklusivitas lintas iman dalam masyarakat Papua yang plural; (b) ia menempatkan nilai kasih dan kepedulian sebagai pusat komunikasi politik; (c) ia mengubah arena politik dari *kontestasi kekuasaan* menjadi *penguatan komunitas*.

Pendekatan ini dapat dipahami melalui teori legitimasi moral seperti yang dikemukakan Beetham (2013), di mana pemimpin memperoleh legitimasi tidak semata lewat posisi formal, tetapi karena kehadiran normatif dan etis yang dirasakan masyarakat. Dalam konteks Papua, di mana nilai kekeluargaan, adat, dan spiritualitas tetap kuat, pesan solidaritas seperti yang ditampilkan BTM resonan secara emosional dan simbolik.

Selain itu, menurut Graber (2012) dalam kajian komunikasi politik, pesan yang berbasis nilai cenderung memiliki daya tahan lebih lama dibanding pesan yang hanya berbasis program atau janji. Karena pesan berbasis nilai menghubungkan tingkat emosional dan identitas publik. BTM menggunakan retorika nilai pelayanan,

kasih, solidaritas untuk menjaga relevansinya sebagai figur moral. Ia tidak menampilkan diri sebagai korban; sebaliknya ia tetap hadir di tengah masyarakat, menunjukkan bahwa meski “kalah secara formal,” ia tidak absen secara sosial.

Pesan-pesan yang muncul dalam kesehariannya (bertemu komunitas adat, mengikuti ritual adat, bersilaturahmi dengan tokoh agama) memperkuat narasi bahwa BTM adalah pemimpin yang “berada di antara rakyat,” bukan di atas mereka. Hal ini selaras dengan konsep *servant leadership* yang menyatakan bahwa pemimpin terbaik adalah yang melayani dan menunjukkan kehadiran. Menurut Denzin dan Lincoln (2011), dalam konteks sosial yang kompleks dan multikultural, komunikasi yang efektif harus berakar pada empati dan pemahaman terhadap nilai-nilai lokal. BTM menampilkan contoh praktis dari hal tersebut dengan komunikasi yang bersifat dialogis, simbolik, dan nilai-berorientasi.

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU), retorika BTM mulai membentuk ruang rekonsiliasi sosial di tengah masyarakat Papua yang sempat mengalami polarisasi politik. Dalam masa transisi ini, kehadiran figur yang menyerukan persatuan dan menghargai keberagaman menjadi faktor penting dalam proses pemulihan sosial yang belum selesai. BTM tampil bukan semata sebagai kontestan politik, tetapi sebagai penghubung moral yang mengupayakan pemulihan kolektif.

Dengan demikian, komunikasi politik BTM selama masa menuju PSU tidak hanya diarahkan untuk meraih dukungan elektoral, tetapi juga untuk memperkuat identitas sosial dan mengatasi trauma pasca-kontestasi. Dalam pidatonya di distrik Jayapura, ia menyatakan: “Ketika suara kita tidak terhitung dalam kotak, suara kita tetap terhitung dalam hati rakyat.” Kalimat ini menggambarkan bagaimana ia mengganti metrik kemenangan formal dengan metrik kehadiran moral dan sosial. Retorika ini mengubah makna kekalahan sementara menjadi bentuk kehadiran yang bermakna dan berkelanjutan.

Simbolisme Budaya dan Politik Makna

Salah satu kekuatan utama strategi komunikasi politik BTM adalah kemampuannya menggunakan simbol budaya untuk membangun *political meaning*. Ia memahami bahwa di Papua, komunikasi tidak sekadar verbal, tetapi juga bersifat simbolik, ritual, dan spiritual. Dalam kampanye PSU 2025, serta pada masa pasca-kekalahan, BTM menggunakan *Gunung Cycloop* sebagai simbol utama perjuangan moralnya. Dalam pidatonya di Sentani, Benhur Tomi Mano menegaskan penolakannya terhadap tambang nikel di kawasan Cycloop dengan menyatakan, “Cycloop bukan sekadar gunung, ia adalah Mama yang memberi napas bagi anak-anak Tabi.” Pernyataan ini memperlihatkan bahwa bagi masyarakat Papua, tanah dan alam bukanlah aset ekonomi semata, melainkan entitas spiritual dan identitas budaya yang harus dijaga dan dihormati (terasapua.com, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana ia menyatukan identitas ekologis, kultural, dan spiritual dalam satu kerangka komunikasi politik. Simbol

“Mama” merepresentasikan *maternal politics* politik pengayoman dan kehidupan, bukan kekuasaan dan dominasi. Dalam kerangka semiotika Peirce (1934), tanda seperti “Cycloop” berfungsi sebagai *interpretant* yakni makna yang lahir di benak publik melalui asosiasi emosional dan kultural. Dengan mengasosiasikan dirinya dengan simbol pelindung tanah dan alam Papua, BTM menciptakan citra moral sebagai *guardian leader* pemimpin yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur.

Dalam teori semiotika politik, Eco (1979) menegaskan bahwa tanda-tanda politik selalu beroperasi dalam sistem makna sosial, di mana simbol tertentu dapat menciptakan hubungan afektif antara pemimpin dan publik. BTM memahami hal ini dan menggunakannya untuk membangun *moral-cultural branding* yang berakar pada narasi lokal. Seperti dijelaskan oleh Menurut Tarumingkeng (2024), Papua memiliki realitas sosial dan kultural yang sangat berbeda dari wilayah lain di Indonesia, sehingga pendekatan kepemimpinan yang efektif harus mempertimbangkan relasi kultural dan nilai-nilai lokal. Dalam konteks ini, strategi komunikasi politik BTM yang menempatkan simbol alam dan perempuan adat sebagai representasi moral dapat dibaca sebagai upaya membangun keotentikan yang berakar pada spiritualitas dan identitas budaya masyarakat Papua.

Penolakannya terhadap tambang nikel di kawasan Cycloop juga memperkuat simbolisme tersebut. Strategi komunikasi politik Benhur Tomi Mano (BTM) dalam menolak tambang nikel di kawasan Cycloop tidak hanya mencerminkan sikap ekologis, tetapi juga memperlihatkan bentuk kepemimpinan yang berakar pada spiritualitas dan relasi kultural masyarakat Papua. Dalam berbagai pidatonya, BTM menyebut Cycloop sebagai “Mama yang memberi napas bagi anak-anak Tabi,” sebuah simbol yang menegaskan bahwa tanah bukan sekadar ruang ekonomi, tetapi tubuh dan jiwa masyarakat adat (teras.papua.com, 2025).

Gagasan ini selaras dengan konsep *eco-spiritual leadership*, di mana pemimpin tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral terhadap keseimbangan ekologis dan warisan leluhur. Sudira et.all. (2021) menekankan bahwa di Papua, legitimasi pemimpin sering kali bergantung pada kemampuannya menjaga tanah adat dan relasi ekologis yang sakral. Dalam konteks ini, penolakan terhadap eksploitasi tambang bukan semata isu lingkungan, melainkan bagian dari narasi identitas dan keberlanjutan budaya.

Lebih jauh, pendekatan BTM yang menempatkan simbol alam dan perempuan adat sebagai representasi moral memperlihatkan strategi komunikasi yang berbasis nilai lokal dan empati kultural. Hal ini sejalan dengan temuan Tarumingkeng (2024), yang menyatakan bahwa kepemimpinan di Papua harus mampu merangkul keanekaragaman budaya dan spiritualitas masyarakat sebagai fondasi politik yang sah dan bermakna.

Dengan demikian, BTM berhasil mengartikulasikan politik lingkungan sebagai politik moral. Ia tidak hanya memanfaatkan isu ekologis sebagai wacana kampanye, tetapi menjadikannya bahasa etis untuk memperkuat relasi dengan

masyarakat adat. Dalam konteks semiotika politik, ia menggeser simbol “kekuasaan” menjadi “pelayanan,” dan simbol “pemerintah” menjadi “penjaga.”

Konsistensi antara Retorika dan Praktik

Analisis terhadap notulensi tim kampanye dan rekaman pertemuan internal menunjukkan bahwa BTM menjalankan komunikasi politik yang konsisten antara wacana dan tindakan. Dalam notulensi rapat tanggal 12 Maret 2025, ia menekankan: “Jangan menukar suara dengan uang; rakyat tidak butuh janji, mereka butuh dipegang tangannya.” Kalimat ini mencerminkan etika politik yang menghindari praktik *clientelism* dan menegaskan bahwa politik harus dikembalikan ke nilai pengayoman dan dialog.

Etika semacam ini memperlihatkan penerapan prinsip *ethical communication* (Johannesen, 2002) bahwa komunikasi politik yang baik tidak hanya menimbang efektivitas pesan, tetapi juga dampak moralnya terhadap publik. Dalam konteks Papua yang kerap diwarnai politik transaksional, sikap BTM memperlihatkan resistensi terhadap praktik dominan dan membangun narasi baru: *politik yang mendengar*.

BTM juga menampilkan pola kepemimpinan deliberatif. Ia membuka ruang diskusi dengan tokoh adat, perempuan, dan pemuda, tidak sekadar untuk menyosialisasikan program, tetapi untuk menampung aspirasi. Pendekatan ini sesuai dengan model *co-cultural engagement* (Orbe, 1997), di mana kelompok subordinat dalam hal ini masyarakat lokal Papua yang sering berada di pinggiran sistem politik nasional menggunakan komunikasi adaptif untuk mempertahankan identitasnya dalam sistem yang lebih besar.

Pendekatan tersebut memperlihatkan gaya komunikasi yang sejalan dengan konsep *communicative action* Habermas (1981), di mana legitimasi dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan rasional-empatik. Dalam konteks ini, komunikasi BTM bukan lagi instrumen persuasi elektoral, tetapi bagian dari *moral discourse* upaya membangun kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemimpinnya.

Selain itu, kehadiran BTM dalam berbagai kegiatan sosial selama masa menuju Pemungutan Suara Ulang (PSU) seperti Safari Ramadhan, misa kebangsaan, kegiatan gereja, dan kunjungan ke kampung-kampung adat menunjukkan kesinambungan citra moralnya sebagai pemimpin yang hadir di tengah masyarakat. Aktivitas ini bukan sekadar strategi elektoral, melainkan bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan publik dan memperkuat solidaritas sosial di tengah ketegangan pasca-kontestasi.

Citra Pasca-Kekalahan: Dari Kekuasaan ke Kebermaknaan

Kekalahan elektoral dalam PSU 2025 justru menjadi momen penting bagi transformasi citra Benhur Tomi Mano (BTM). Ia tidak menempatkan kekalahan sebagai aib, melainkan sebagai panggilan moral untuk memperjuangkan keadilan dan integritas demokrasi di Papua. Dalam konferensi pers bertajuk Koalisi Perjuangan

Rakyat, BTM mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol “matinya demokrasi di Papua” dan menyatakan bahwa perjuangan belum selesai. Ia menegaskan bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal suara, tetapi soal keberpihakan terhadap rakyat dan nilai-nilai kebenaran (InfoPapua.id, 2025).

Narasi ini menunjukkan pergeseran strategi komunikasi BTM dari orientasi *power legitimacy* berbasis hasil elektoral menuju *moral legitimacy* yang berakar pada keberpihakan terhadap rakyat, spiritualitas lokal, dan penolakan terhadap ketidakadilan struktural. Kekalahan formal menjadi titik balik untuk membangun legitimasi berbasis nilai dan solidaritas sosial.

Dalam pandangan teori legitimasi Beetham (1991), kekuasaan yang kehilangan dasar legalnya masih dapat mempertahankan otoritas moral jika pemimpin tersebut tetap diakui oleh masyarakat berdasarkan nilai kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan. Itulah yang dilakukan BTM. Ia menolak menjadi oposisi destruktif dan memilih menjadi “penyeimbang moral” sebuah peran simbolik yang jarang dimainkan oleh politisi modern.

Strategi ini juga dapat dibaca sebagai bentuk *moral-cultural branding* (Scammell, 2007), di mana figur politik membangun merek personal berbasis nilai budaya dan moral. Branding BTM tidak bertumpu pada slogan, tetapi pada makna: pengayoman, kasih, dan kesetiaan terhadap tanah. Dengan demikian, BTM menghadirkan model *Papua-based leadership branding* yang menggabungkan nilai lokal dengan etika universal.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa legitimasi politik di Papua tidak bersifat linier, melainkan siklikal berputar antara kekuasaan formal dan pengakuan moral. Ketika satu dimensi melemah, dimensi lainnya dapat memperkuat keberlanjutan kepemimpinan. Dalam kajian media nasional, representasi pemimpin lokal Papua sering kali dikonstruksi melalui narasi moral dan simbolik, bukan administratif. Seperti ditunjukkan oleh Wirawan at.all (2022), media arus utama cenderung menampilkan tokoh Papua sebagai figur budaya atau korban konflik, bukan sebagai aktor politik yang rasional dan strategis. Representasi ini berdampak pada persepsi publik yang menyederhanakan kompleksitas kepemimpinan lokal.

Transformasi Komunikasi Politik: Dari Retorika ke Spiritualitas

Kekalahan elektoral dalam PSU 2025 menjadi titik balik penting dalam transformasi citra politik Benhur Tomi Mano (BTM). Ia tidak memosisikan kekalahan sebagai kegagalan, melainkan sebagai panggilan moral untuk memperjuangkan keadilan dan integritas demokrasi di Papua. Dalam konferensi pers bertajuk *Koalisi Perjuangan Rakyat*, BTM menyatakan bahwa perjuangan belum selesai: “Kita adalah pemenang BTM-YB di putaran pertama Pilkada Papua. Hanya karena persoalan surat keterangan domisili, kita dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi.” (InfoPapua 2025)

Pernyataan ini menunjukkan pergeseran komunikasi politik BTM dari orientasi *power legitimacy* berbasis hasil elektoral menuju *moral legitimacy* yang berakar pada keberpihakan terhadap rakyat dan nilai-nilai keadilan. Ia membingkai

kekalahan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal tanggung jawab baru untuk menjaga martabat demokrasi dan suara masyarakat Papua.

Dalam konteks Papua, pemimpin seperti BTM menegaskan peran ganda sebagai figur politik dan penuntun moral. Seperti ditunjukkan oleh Ibo (2025), kepemimpinan spiritual di Papua berakar pada pengasuhan iman dan kedekatan komunitas. Pendekatan ini berfungsi sebagai strategi de-eskalasi konflik, menggantikan narasi kompetisi dengan narasi doa dan pengharapan. Hal ini sejalan dengan temuan Ilahi et al. (2024), yang menunjukkan bahwa pemimpin Papua yang mengedepankan bahasa spiritual lebih berhasil menjaga stabilitas sosial di masa pasca-pemilihan.

Selain itu, pendekatan spiritual ini berfungsi sebagai strategi *de-escalation* konflik politik. Dengan menggantikan narasi kompetisi menjadi narasi doa dan pengharapan, BTM menurunkan ketegangan politik pasca-PSU. Hal ini sejalan dengan temuan **Widjojo (2024)** yang menyebut bahwa pemimpin Papua yang mengedepankan bahasa spiritual lebih berhasil menjaga stabilitas sosial di masa pasca-pemilihan dibanding yang bersifat konfrontatif.

Dengan demikian, komunikasi politik BTM dapat dipahami sebagai bentuk *ethical populism* populisme yang tidak dibangun melalui kemarahan atau identitas eksklusif, melainkan melalui kasih dan tanggung jawab moral. Pendekatan ini berpotensi menjadi model komunikasi politik alternatif di kawasan Timur Indonesia, yang berakar pada nilai adat dan spiritualitas lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekalahan elektoral tidak selalu menandai berakhirnya legitimasi seorang pemimpin, melainkan dapat menjadi titik balik untuk membangun legitimasi moral yang lebih kuat. Benhur Tomi Mano (BTM) berhasil mengonversi kekalahan politiknya menjadi modal simbolik dan moral melalui strategi komunikasi yang berakar pada nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan solidaritas sosial masyarakat Papua.

Strategi komunikasi BTM menampilkan tiga dimensi utama. Pertama, **retorika moral dan solidaritas** yang menekankan kasih, pelayanan, dan kehadiran di tengah rakyat, membentuk citra pemimpin yang empatik dan inklusif. Kedua, **simbolisme budaya** seperti pemaknaan “Cycloop sebagai Mama” merepresentasikan keterikatan spiritual antara manusia dan tanah sebagai sumber identitas kolektif. Ketiga, **transformasi komunikasi politik menuju spiritualitas**, di mana pesan politik tidak lagi berorientasi pada kekuasaan, melainkan pada penyembuhan sosial dan rekonsiliasi pasca kontestasi.

Dengan demikian, figur BTM merepresentasikan model **kepemimpinan moral-kultural Papua** yang menempatkan politik sebagai ruang pelayanan (*servant leadership*) dan pemulihan sosial (*politics as healing*). Kepemimpinan semacam ini menjadi alternatif atas praktik politik transaksional, sekaligus memperlihatkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin terletak bukan pada kemenangan elektoral,

melainkan pada kemampuannya menjaga nilai, kasih, dan kepercayaan publik dalam situasi paling sulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Beetham, D. (2013). *The legitimation of power*. Bloomsbury Publishing.
- Chandler, D. (2022). *Semiotics: The basics*. Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The SAGE handbook of qualitative research*. SAGE Publications.
- DetikNews. (2025, September 17). *MK tolak gugatan hasil PSU Pilgub Papua*. <https://news.detik.com/berita/d-8116075/mk-tolak-gugatan-hasil-psu-pilgub-papua>
- Eco, U. (1979). *A theory of semiotics* (Vol. 217). Indiana University Press.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Graber, D. A. (2012). *Processing politics: Learning from television in the Internet age*. University of Chicago Press.
- Habermas, J. (1981). *The theory of communicative action: Reason and the rationalization of society* (Vols. 1–2, T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
- Ibo, F. (2025). Konflik internal kepemimpinan gembala dalam penggembalaan terhadap pertumbuhan iman jemaat di Tanah Papua. *Jurnal Teologi Widyasari*, 7(1), 85–98. <https://widyasari-press.com/wp-content/uploads/2025/05/9.-Frengky-Ibo-KONFLIK-KEPEMIMPINAN-GEMBALA-DALAM-PENGGEMBALAAN-TERHADAP-PERTUMBUHAN-IMAN-.pdf>
- Ilahi, M. I. N., Sukendro, A., Madjid, M. A., & Widodo, P. (2024). Penyelesaian konflik Papua dalam perspektif kepemimpinan strategis. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(2), 101–120. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/download/55728/24597>
- InfoPapua.id. (2025, October 17). *Pernyataan lengkap BTM-CK terkait kekalahan di Pilgub Papua*. <https://infopapua.id/2025/10/17/pernyataan-lengkap-btm-ck-terkait-kekalahan-di-pilgub-papua/>
- Johannesen, R. L., Valde, K. S., & Whedbee, K. E. (2008). *Ethics in human communication*. Waveland Press.
- KabarPapua.co. (2025, June 7). *Ribuan massa deklarasi dukung BTM-CK pada PSU Pilkada Papua 2025*. <https://kabarpapua.co/ribuan-massa-deklarasi-dukung-btm-ck-pada-psu-pilkada-papua-2025/>
- KabarPapua.co. (2025, August 22). *Pidato Calon Gubernur Papua Benhur Tomi Mano: Perjuangan ini milik rakyat Papua*. <https://kabarpapua.co/pidato-calon-gubernur-papua-benhur-tomi-mano-perjuangan-ini-milik-rakyat-papua>